

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses kenaikan kapasitas perekonomian suatu wilayah atau negara dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang dan jasa kepada penduduknya (Kuznet dalam (Jhingan, 2013)). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Maju atau mundurnya kinerja perekonomian dapat dilihat dari besarnya nilai pertumbuhan ekonomi yang dicapai, meskipun masih banyak indikator lain yang dapat digunakan sebagai ukuran. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya berguna untuk menilai perkembangan aktivitas perekonomian antarwaktu dalam suatu wilayah. Namun, indikator ini juga berguna untuk membandingkan capaian perkembangan perekonomian dengan wilayah yang lain.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi prasyarat yang diperlukan untuk proses pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan penduduk. Pada hakikatnya, capaian pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah merupakan akumulasi dari hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan pada setiap wilayah yang lebih kecil. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kemampuan semua provinsi dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi pada level provinsi juga sangat ditentukan oleh kemampuan semua kabupaten/kota dalam mengelola potensi sumber daya yang dimilikinya.

Pembangunan daerah merupakan salah satu tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara di bidang ekonomi berupa kemakmuran. Untuk memenuhi tujuan tersebut terdapat syarat-syarat yang perlu dilakukan, misalnya pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam secara maksimal, kesempatan kerja yang luas, pengentasan kemiskinan, infrastruktur transportasi, akses ke wilayah komunikasi dan infrastruktur, pemerataan pendidikan dan perawatan kesehatan. Secara

ekonomi, pembangunan berarti upaya suatu negara untuk meningkatkan outputnya lebih cepat dari pertumbuhan penduduknya, hal ini dapat dicapai dengan mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita secara berkelanjutan (Permatasari, 2019).

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dipengaruhi dengan perencanaan yang baik dan kebijakan yang tepat. Todaro mengatakan terdapat tiga nilai pokok yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya semakin berkembang, meningkatkan rasa harga diri, dan kemampuan masyarakat untuk memilih semakin meningkat (Todaro, 2011).

Di era otonomi daerah saat ini, pembangunan daerah akan menjadi semakin kompleks. Persaingan antar daerah yang ketat dapat terjadi akibat adanya disparitas antar wilayah dan perkembangan globalisasi. Hal tersebut dapat mendorong suatu daerah untuk meningkatkan daya saing wilayahnya agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat (Budianto, 2020). Setiap daerah tentunya memiliki hasil produksi yang berbeda hal ini dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan untuk memproduksi suatu komoditas dengan harga yang berbeda-beda ada yang harus membayarnya dengan harga yang rendah dan ada juga yang membayar dengan harga relatif mahal. Faktor inilah yang dapat berdampak pada adanya daerah yang mampu untuk cepat tumbuh, cepat berkembang serta mengalami pertumbuhan yang lambat. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka, pemerintah daerah dituntut agar mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Tingginya tingkat pembangunan ekonomi dilihat dari tingginya nilai PDRB. Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk suatu negara secara berkelanjutan merupakan salah satu bentuk pembangunan. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) biasanya berada dalam lingkup daerah. Disisi lain, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita berarti PDRB dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

Indikator pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil dilihat dari beberapa parameter salah satunya yaitu adanya pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi yang relatif menurun.

Produk Domestik Regional Bruto sendiri merupakan nilai total keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh semua unit produksi dalam periode waktu dan daerah tertentu. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui PDRB, dengan cara melihat perbedaan pendapatan dari tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Jika terjadi peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya maka dapat dijadikan parameter perekonomian dikatakan tumbuh. Namun pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dengan PDRB tinggi disuatu daerah bukan berarti tingkat kesejahteraannya tinggi. PDRB per kapita menjadi rendah dipengaruhi oleh Jumlah penduduk yang tinggi. (BPS, 2021)

Sjafrizal dalam Sapriadi (2015) menyebutkan bahwa sektor basis merupakan tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive Advantage*) yang relatif tinggi. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor-sektor yang kurang potensial tetapi dapat berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries*.

Menurut Richardson sebagai teori basis ekonomi, Permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah merupakan faktor penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan industri dapat menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dengan cara menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, dan bahan baku untuk diekspor (Tutupoho, 2019). Opini ini memberikan definisi bahwa suatu wilayah yang memiliki sektor unggulan apabila dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan wilayah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. (Basuki, 2017)

Di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdiri atas satu kota dan empat kabupaten. Dan dari masing-masing kabupaten/kota tersebut tentunya memiliki keadaan geografis yang berbeda yang

menyebabkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota juga berbeda, sehingga memiliki PDRB yang berbeda-beda. Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah penduduk 434.483 jiwa dan luas wilayah 586,28 km² memiliki PDRB sebesar Rp 8.414,75 Miliar. Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk 1.029.997 jiwa dan luas wilayah 508,13 km² memiliki PDRB sebesar Rp 18.838,13 Miliar. Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk 749.274 jiwa dan luas wilayah 1431,42 km² memiliki PDRB sebesar Rp 13.513,37 Miliar. Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk 1.232.598 jiwa dan luas wilayah 574,82 km² memiliki PDRB sebesar Rp 33.906,37. Dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk 435.936 jiwa memiliki PDRB sebesar 27.015,49 Miliar. Kabupaten/kota dengan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo. Sementara itu, kabupaten/kota dengan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB terendah adalah kabupaten Gunungkidul.

Menurut data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari berbagai bidang pada periode tahun 2018-2021 mengalami penurunan yang salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat bahwa pada tahun 2020 resesi perekonomian terdalam dan terburuk se-Jawa ditempati oleh Provinsi DIY. Berbeda dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kawasan lain, kontribusi PDRB Provinsi DIY pada tahun 2020 relatif kecil. Tingkat kontribusi Provinsi DIY pada Pulau Jawa hanya sebesar 1,40 persen, sedangkan kontribusi terhadap 34 provinsi lain hanya 0,88 persen.

Salah satu alasan terjadinya penurunan PDRB pada Provinsi DIY ini disebabkan karena adanya kebijakan yang dilakukan pada saat pandemi. Kebijakan yang diambil pemerintah pada awal masuknya pandemi Covid-19 yaitu PSBB. PSBB atau Pembatasan Sosial bersekala besar ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid. Strategi ini dilakukan pemerintah untuk

menekan penyebaran Covid-19. Akibat diterapkannya regulasi PSBB ini jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi DIY menurun tajam pada pekan pertama kebijakan diterapkan. Namun, sejak Januari 2021 kebijakan PSBB yang di ambil oleh pemerintah pusat telah berganti dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Berlevel memberikan dampak langsung bagi perekonomian DIY. Dampak PPKM Darurat dan Level 4 menyebabkan pertumbuhan ekonomi DIY tertahan lebih dalam dibandingkan dengan Nasional. Pada triwulan III 2021, ekonomi DIY tumbuh 2,3 persen (yoy) yang melambat dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang tumbuh 11,8 persen (yoy) (Anonim, 2021).

Sebelum masa pandemi Covid-19, struktur perekonomian DIY ditopang oleh empat kategori usaha utama, yakni industri manufaktur (C); konstruksi (F); penyediaan akomodasi dan makan minum (I); dan pertanian (A). Andil keempat kategori usaha terhadap perekonomian DIY masing-masing sebesar 12,82 persen; 11,14 persen; 10,37 persen; dan 9,38 persen (BPS, 2021). Selama masa pandemi, sebagian besar aktivitas usaha pada berbagai kategori mengalami kontraksi. Namun demikian, ada beberapa kategori usaha yang justru mengalami perubahan yang positif berupa kenaikan nilai tambah secara nyata karena adanya peningkatan permintaan. Kondisi ini tentu menyebabkan terjadinya perubahan dan pergeseran dalam struktur perekonomian DIY.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memilih kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu karena Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang hanya memiliki 5 wilayah yaitu 1 perkotaan dan 4 kabupaten, namun justru memiliki ketimpangan yang paling besar di Indonesia. Hal ini berarti pembangunan di provinsi DIY sendiri masih melahirkan ketimpangan pengeluaran yang relatif tinggi. Untuk mengetahui potensi serta identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah daerah istimewa Yogyakarta sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

wilayah DIY. Dengan melihat latar belakang diatas serta pentingnya masalah pembangunan ekonomi terkait dengan PDRB harga Konstan untuk memaksimalkan sektor potensial tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi basis ekonomi pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Sektor-sektor apa saja yang mendorong pertumbuhan pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Sektor-sektor apa saja yang tumbuh cepat pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Sektor-sektor apa saja yang memiliki keuntungan lokasional yang positif pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Bagaimana Tipologi Klassen pada Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sektor basis pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui sektor yang mendorong pertumbuhan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Mengetahui sektor yang tumbuh cepat pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Mengetahui sektor yang memiliki keuntungan lokasional yang positif pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Mengetahui keadaan Tipologi Klassen di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto, Sektor Basis, sektor pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dan peneliti selanjutnya baik untuk pnelaahan lebih lanjut maupun sebaagai bahan perbandingan.
4. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi – instansi terkait dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan daerah.